

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suriah merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Barat yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad dan pada saat ini sedang mengalami konflik bersenjata internal. Pada tanggal 26 Januari 2011 terjadi demonstrasi publik Suriah, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya, dan mengakhiri hampir lima dekade pemerintahan Partai Ba'ath. Pemerintah Suriah mengerahkan Tentara Nasional Suriah untuk memadamkan pemberontakan tersebut.

Pada awal tahun 2011 aksi-aksi demo mulai bermunculan secara terus-menerus di Suriah, rakyat Suriah mulai menyuarakan tuntutan mereka untuk menghentikan rezim Bashar Al-Assad. Aksi demo ini dibubarkan oleh tentara Suriah dan mengakibatkan ditahannya beberapa demonstran. Bentrokan antara demonstran dan tentara Suriah pun semakin sering terjadi. Pemerintah Suriah pun tak segan-segan untuk menggunakan senjata api bahkan tank untuk merepresif rakyat dan membungkam gerakan protes tersebut. Aksi represif ini dahulu merupakan cara yang efektif untuk membungkam rakyat Suriah, namun dimasa sekarang ini hanya memicu terjadinya demonstrasi-demonstrasi lain yang lebih dahsyat. Aksi protes ini menuntut penghentian Rezim Bashar Al-Assad yang dianggap sebagai diktator, diterapkannya

sistem multipartai, dan juga kebebasan yang lebih bagi rakyat, dan juga pemberhentian undang-undang darurat yang telah diterapkan sejak 1963. Meski telah dilakukan upaya-upaya reformasi oleh Presiden Bashar Al-Assad, namun hal itu dianggap tidak cukup dan terlambat. Kini rakyat Suriah hanya menginginkan penggulingan rezim Bashar Al-Assad dan pengangkatan pemerintah yang sama sekali baru berdasarkan pemilu yang demokratis. Kebrutalan rezim Assad pun semakin menjadi-jadi, anak-anak pun saat ini menjadi target kejahatan tentara-tentara Assad. Sejak bulan Januari 2011 lalu rezim Assad telah meluncurkan operasi biadab dan serangan dahsyatnya terhadap rakyat Suriah. Masyarakat digempur dengan tank-tank, bom, mortir dan tembakan dari pesawat terbang. Ribuan penduduk yang tidak berdosa, tanpa senjata, dibunuh di rumah-rumah mereka. Organisasi-organisasi kemanusiaan mengatakan, sekarang jumlah korban yang dibunuh lebih dari 70.000 orang. Namun, diperkirakan jumlahnya lebih besar dari itu.¹

Menurut pemerintah Suriah bahwa aksi demonstrasi yang terjadi di Suriah merupakan suatu aksi-aksi pengacau keamanan di Suriah yang didalangi oleh motif tertentu. Namun hal tersebut tidak terbukti kebenarannya sampai sekarang ini karena hal tersebut merupakan suatu opini publik yang dibuat oleh pemerintah Suriah untuk mengalihkan isu yang sebenarnya dari konflik yang terjadi di Suriah.

Dengan berjalannya waktu, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Suriah akhirnya berkembang menjadi suatu pemberontakan nasional.

¹ [Http://en.wikipedia.org/wiki/konflik-suriah](http://en.wikipedia.org/wiki/konflik-suriah), *Internasional conflict, International Committee of The Red Cross*, diakses 5 April 2013.

Aksi pemberontakan nasional tersebut terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan dengan sistem pemerintahan Presiden Bashar al-Assad selama ini dan juga keinginan dari rakyat Suriah untuk melakukan revolusi di Suriah. Aksi pemberontakan nasional tersebut akhirnya berujung pada terjadinya konflik bersenjata internal di Suriah.

Dengan adanya bentrokan yang terjadi terus menerus antara para demonstran dengan pemerintah Suriah tersebut membuat rakyat Suriah semakin memberontak dan melawan pemerintah Suriah. Hal ini menyebabkan rakyat Suriah mulai mengangkat senjata dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah Suriah. Aksi perlawanan dari Rakyat Suriah pun sangat beragam, mulai dari secara individu maupun kelompok. Namun sering kali pertempuran dimenangkan oleh pasukan pemerintah Suriah. Hal ini disebabkan karena perlawanan rakyat Suriah cenderung masih bersifat individual dan tidak terorganisir dengan baik secara strategi dan operasi militernya. Berdasarkan hal tersebut membuat rakyat Suriah akhirnya merasa perlu untuk membentuk suatu kekuatan oposisi yang mampu menandingi kekuatan pasukan tentara Suriah. Oleh karena itu pada tanggal 29 Juli 2011 dalam sebuah video yang dirilis di internet oleh sekelompok desertir berseragam dari militer Suriah yang membelot dan para kelompok-kelompok pemberontak kecil serta penduduk sipil yang turut mengangkat senjata bergabung dalam suatu organisasi yang dibentuk bersama oleh mereka dengan nama Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)*.² *Free Syrian Army (FSA)* adalah struktur oposisi utama bersenjata yang beroperasi

² [Http://en.wikipedia.org/wiki/konflik-suriah](http://en.wikipedia.org/wiki/konflik-suriah), Landis, Joshua (29 juli 2011), *Free Syrian Army Founded by Seven Officers to Fight the Syrian Army*, hal. 1, diakses 7 Agustus 2011.

di Suriah yang telah aktif selama perang saudara di Suriah yang terdiri dari para personel angkatan bersenjata Suriah yang membelot dan relawan. Tentara Pembebasan Suriah (*FSA*) tidak memiliki tujuan politik kecuali untuk melengserkan Bashar al-Assad sebagai Presiden Suriah.

Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah merupakan konflik bersenjata internal. Dalam Hukum Humaniter Internasional, suatu konflik bersenjata digolongkan menjadi dua macam yaitu konflik bersenjata internasional (*International Armed Conflict*) dan konflik bersenjata non-internasional (*Non-International Armed Conflict*). Konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi antar negara dan *CAR Conflict* (*Colonial Domination, Alien Occupation, dan Racist Regimes*).³ Konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara kelompok bersenjata yang bukan merupakan bagian dari angkatan bersenjata negara tersebut bertikai dengan pemerintah pusat negara itu. Selain itu juga Konflik bersenjata non-internasional dapat terjadi karena adanya pertikaian antara faksi-faksi di suatu Negara. Dengan adanya penggolongan macam-macam konflik tersebut maka Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah merupakan konflik bersenjata non-internasional karena Konflik bersenjata internal di Suriah tersebut melibatkan antara pemerintah Suriah dengan para pemberontak yang menamakan kelompok organisasinya dengan nama Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)*.

³ Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et al, 1991, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of The Red Cross*, Jakarta, hal. 133.

International Committee of the Red Cross (ICRC), secara resmi menyatakan bahwa konflik berdarah yang terjadi di Suriah merupakan perang saudara. "Kita sekarang membicarakan konflik bersenjata non-internasional di negara ini (Suriah)," kata juru bicara ICRC Hicham Hassan.⁴ Status yang diumumkan Palang Merah Internasional pada hari Minggu tanggal 15 juli 2012 tersebut, memberi implikasi akan adanya tuntutan kejahatan perang pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pernyataan *ICRC* muncul ketika tim pemantau PBB mengumpulkan detail baru tentang apa yang terjadi di Desa Treimseh yang disebut kelompok oposisi sebagai pembantaian oleh tentara rezim Presiden Bashar al-Assad.

Berdasarkan uraian di atas yang mengatakan bahwa konflik di Suriah merupakan konflik bersenjata internal maka konsekuensinya adalah Hukum Humaniter Internasional menjadi berlaku dalam konflik bersenjata internal di Suriah. Hukum Humaniter Internasional menurut *ICRC* yaitu :

*"International Humanitarian Law is a set of rules which seek, for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflict. It protects persons who are not or are no longer participating in the hostilities and restricts the means and methods of warfare. International Humanitarian Law is also known as the law of war or the law of armed conflict."*⁵

Hukum Humaniter Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah sebagian dari hukum perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan bagian hukum perang yang

⁴ [Http://www.politikindonesia.com-politik](http://www.politikindonesia.com-politik)>ICRC, *Nyatakan Konflik Suriah adalah Perang Saudara, Suriah bergejolak lagi*, senin 16 juli 2012, 09:29:40 WIB.

⁵ [Http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/humanitarian-law-factsheet/\\$File/What_is_IHL.pdf](http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/humanitarian-law-factsheet/$File/What_is_IHL.pdf), ICRC, *Humanitarian of law*, hal. 1, posted on 20 Januari 2010.

mengatur cara dan saran perang.⁶

Ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang diatur dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949⁷ dan *Protocol additional to to the Geneva Convention of 12 August 1949 and relating to the protection of victims of Non-International Armed Conflict* atau yang selanjutnya disebut dengan nama Protokol Tambahan II tahun 1977 memberikan definisi yang jelas tentang konflik bersenjata internal. Menurut pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, konflik bersenjata internal atau konflik bersenjata non-internasional (pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional) adalah konflik antara pasukan Pemerintah dan pasukan pemberontak atau antara dua pasukan pemberontak atau pada konflik lain yang mempunyai seluruh karakteristik perang tetapi berlangsung di dalam batas-batas wilayah sebuah negara. Sedangkan menurut Protokol Tambahan II tahun 1977, konflik bersenjata internal atau konflik bersenjata non-internasional adalah sengketa bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisir lainnya yang terorganisasi dibawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta mampu menerapkan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam Protokol Tambahan II

⁶ GPH Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, CV Rajawali, Jakarta, hal. 18-19.

⁷ Merupakan ketentuan-ketentuan yang bersamaan (*common articles*) dari konvensi Jenewa 1949.

tahun 1977.⁸

Salah satu prinsip yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal dengan nama prinsip pembedaan (*distinction principle*) yaitu suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan yaitu penduduk sipil (*civilian*) dan peserta tempur atau kombatan (*combatant*). Pengertian penduduk sipil secara negative adalah orang-orang yang tidak ikut dalam pertikaian dan mereka yang tidak mengangkat senjata, sedangkan kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif ikut terlibat dalam pertempuran dan permusuhan (*hostilities*). Sedangkan menurut pendapat para ahli, kombatan adalah penduduk dari negara yang berperang yang turut serta aktif dalam pertempuran yang berhak melakukan perbuatan perang dan dapat dijadikan perbuatan sasaran perang serta bila jatuh ketangan musuh harus dilindungi sebagai tawanan perang.⁹ Berdasarkan prinsip pembedaan maka *Free Syrian Army (FSA)* dapat digolongkan sebagai kombatan dalam konflik bersenjata di Suriah.

Prinsip pembedaan (*distinction principle*) dulunya berawal dari praktek-praktek hukum kebiasaan yang diterapkan dalam masa-masa peperangan zaman dahulu. Prinsip pembedaan ini akhirnya dikodifikasikan dalam ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Dalam *Protocol additional to the Geneva Convention of 12 August 1949 and relating to the protection of victims of International Armed Conflict* atau selanjutnya disebut dengan

⁸ Ambarwati. Denny Ramdhany. Rina Rusman, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional*, edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 59.

⁹ *Ibid.* hal. 63.

nama Protokol Tambahan I yaitu pada pasal 48 Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang konflik bersenjata internasional telah dirumuskan secara tegas bahwa para pihak yang berperang harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, dan mereka juga harus mengarahkan serangan hanya pada kombatan musuh dan obyek militer musuh.¹⁰

Pada pasal 43 Protokol Tambahan II tahun 1977, untuk membedakan mana yang kombatan dan mana yang penduduk sipil maka harus ada kriteria yang jelas mengenai keduanya. Kombatan adalah penduduk dari negara yang berperang yang turut serta aktif dalam pertempuran yang berhak melakukan perbuatan perang dan dapat dijadikan perbuatan sasaran perang serta bila jatuh ketangan musuh harus dilindungi sebagai tawanan perang.¹¹ Pengertian penduduk sipil secara negative adalah orang-orang yang tidak ikut dalam pertikaian dan mereka yang tidak mengangkat senjata.

Menurut pasal 1, 2, dan 3 *Hague Regulations* yang merupakan *annex* atau lampiran pada konvensi IV Den Haag tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat telah diatur secara jelas mengenai kombatan dan non kombatan.¹² Pada pasal 1 dan 2 *Hague Regulations* menyatakan bahwa yang termasuk kombatan adalah tentara (*army*), milisi dan corps sukarelawan, dan *levee en masse*. Sedangkan menurut pasal 3 *Hague Regulations* bahwa belligerent terdiri dari kombatan dan non kombatan. Istilah non kombatan dalam ketentuan ini bukanlah dalam arti penduduk sipil (*civilians*), melainkan

¹⁰ *Protokol Tambahan I (1977)*: Protokol Tambahan untuk Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional. Hingga 12 Januari 2007, Protokol ini telah diratifikasi oleh 167 negara.

¹¹ *Ibid.*

¹² Konvensi Jenewa 1907.

bagian dari angkatan bersenjata yang tidak bertempur seperti dokter militer dan rohaniawan. Dan apabila tertangkap musuh maka mereka berhak memperoleh status sebagai tawanan perang.

Berdasarkan uraian diatas menurut pasal 1, 2, dan 3 *Hague Regulations* maka Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* dapat digolongkan sebagai kombatan. Kombatan menurut *Hague Regulations* adalah tentara (*army*), milisi dan corps sukarelawan, dan *levee en masse*. Oleh karena *Free Syrian Army (FSA)* merupakan kelompok oposisi yang terdiri dari tentara-tentara Suriah yang membelot, milisi-milisi dan corps sukarelawan maka *Free Syrian Army (FSA)* dapat digolongkan sebagai kombatan. Sedangkan menurut pasal 3 *Hague Regulations* bahwa belligerent terdiri dari kombatan dan non kombatan. Sedangkan menurut pasal 43 Protokol Tambahan I tahun 1977, kombatan adalah angkatan bersenjata dari pihak yang bertikai dan terdiri dari angkatan bersenjata yang terorganisasi, group dan (kesatuan) unit di bawah komando yang bertanggung jawab. Anggota angkatan yang bersenjata dari pihak yang bertikai adalah kombatan, yaitu mereka berhak untuk ikut serta secara langsung dalam permusuhan.¹³ Dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 juga menegaskan bahwa bagi pihak yang tidak ikut berperang dianggap sebagai penduduk sipil dan bagi pihak yang turut serta dalam berperang disebut dengan kombatan. Dan bagi kombatan yang tertangkap oleh musuh maka harus diperlakukan sebagai tawanan perang.

¹³ [Http://www. Hukum Internasional.com](http://www.HukumInternasional.com)-Harrison Papande Siregar, *Internasional of Law – kombatan (combatant)*, hal. 2, Posted on 6 November 2010.

Dengan demikian maka *Free Syrian Army (FSA)* harus digolongkan sebagai kombatan karena *Free Syrian Army (FSA)* telah memenuhi syarat-syarat sebagai kombatan dalam pasal 1, 2, 3 *Hague Regulations*. Selain itu juga *Free Syrian Army (FSA)* telah memenuhi syarat sebagai pemberontak yang mana mereka memiliki struktur organisasi serta komando, menguasai wilayah negara secara efektif, mampu melakukan operasi militer secara teratur dan bersama, serta mampu melaksanakan ketentuan protokol.

Namun dalam praktiknya, Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* tidak mendapatkan pengakuan oleh pemerintah Suriah sebagai Kombatan. Malah sebaliknya pemerintah Suriah menganggap Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* sebagai suatu gerakan pengacau keamanan di Suriah atau pelaku tindak kriminal yang dimana gerakan tersebut dianggap sebagai suatu tindakan terorisme yang didalangi oleh pihak oposisi dengan mengatasnamakan pembebasan tetapi pada dasarnya adalah suatu tindakan pemberontakan yang bernada sektarian yang mana pihak tersebut didominasi oleh anggota Muslim Sunni.

Pemerintah Suriah yang tidak mengakui Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* sebagai kombatan dalam konflik bersenjata di Suriah maka secara tidak langsung telah melanggar ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional. Karena dalam Hukum Humaniter Internasional dalam suatu konflik bersenjata non-internasional harus ada penentuan status yang jelas antara pihak yang bertikai. Dan penentuan status tersebut diatur dalam salah satu prinsip Hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip

pembedaan (*distinction principle*). Berdasarkan prinsip pembedaan (*distinction principle*) telah jelas dikatakan bahwa harus membedakan penduduk sipil (*civilian*) dan peserta tempur atau kombatan (*combatant*).

Dalam beberapa kasus yang beritakan oleh dimedia massa elektronik dan media cetak dikatakan bahwa Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* yang ditangkap oleh tentara pemerintah Suriah ada yang ditangkap sebagai tawanan perang dan ada yang malah sebaliknya mereka yang langsung dieksekusi mati karena dianggap melawan pasukan keamanan.

Dengan adanya pernyataan dari beberapa media massa tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perlindungan terhadap Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army (FSA)* dalam konflik bersenjata di Suriah. Hal ini menyebabkan terjadi pelanggaran dalam ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Pelanggaran tersebut adalah bahwa ketika *Free Syrian Army (FSA)* ditangkap oleh tentara pemerintah Suriah maka sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter bahwa bila jatuh ketangan musuh atau ditangkap musuh maka harus dilindungi sebagai tawanan perang. Dalam realitanya *Free Syrian Army (FSA)* yang ditangkap oleh tentara pemerintah Suriah justru dieksekusi mati langsung oleh tentara pemerintah Suriah.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Free Syrian Army (FSA) dalam Konflik Bersenjata di Suriah jika tertangkap Tentara Nasional Suriah ? “

C. Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui lebih lanjut mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota *Free Syrian Army (FSA)* dalam Konflik Bersenjata di Suriah jika jatuh ketangan pasukan musuh.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata satu untuk menjadi seorang Sarjana Hukum.

D. Manfaat Penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperoleh pengetahuan tentang Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota *Free Syrian Army (FSA)* dalam Konflik Bersenjata di Suriah jika jatuh ketangan pasukan musuh.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Humaniter Internasional pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan perlindungan kombatan dalam suatu konflik bersenjata internal.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami inti persoalan dari konflik bersenjata internal di Suriah agar dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang bagaimana perlindungan itu diberikan terhadap pihak-pihak yang bersengketa di Suriah dan mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.

E. Keaslian Penelitian :

Sepengetahuan peneliti, bahwa penulisan hukum dengan permasalahan ini yaitu Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Free Syrian Army (FSA) dalam Konflik Bersenjata di Suriah jika jatuh ketangan pasukan musuh belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Sehingga penelitian ini merupakan karya sendiri dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Free Syrian Army (FSA) dalam Konflik Bersenjata di Suriah jika jatuh ketangan pasukan musuh.

Berikut ini penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan ini, antara lain :

1. SKRIPSI

a. Judul Penelitian :

Kajian Hukum Humaniter Internasional terhadap agresi militer NATO dalam perang Kosovo.

b. Identitas Peneliti :

NPM : 040508905

Nama Mahasiswa : Ruben Condro Lukito Tamtomo

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah :

“Bagaimanakah Hukum Humaniter Internasional terhadap agresi militer NATO dalam perang Kosovo?”

d. Tujuan Penelitian :

1) Tujuan obyektif :

Mengkaji secara analisis dan teoritis agresi militer NATO dalam perang Kosovo berdasarkan kajian Hukum Humaniter Internasional.

2) Tujuan subyektif :

Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

e. Hasil penelitian :

Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan kajian Hukum Humaniter Internasional, agresi militer NATO merupakan suatu pelanggaran, karena NATO mengabaikan ketentuan dasar dari Hukum Humaniter Internasional yaitu adanya prinsip Pembedaan. Serangan-serangan yang dilakukan oleh NATO mengakibatkan banyak penduduk sipil yang tewas terluka, selain itu juga terdapat temuan bahwa adanya penggunaan *Cluster Bomb* yang merupakan bukti bahwa NATO mengabaikan ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

2. SKRIPSI

a. Judul Penelitian :

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional

tentang perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Lebanon tahun 2006.

b. Identitas Peneliti :

NPM : 020508164

Nama Mahasiswa : Aires Oldegard Assuncao Sarmento

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah :

“Bagaimana pelaksanaan perlindungan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil dalam konflik bersenjata di Lebanon tahun 2006?”

d. Tujuan Penelitian :

1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil dalam konflik bersenjata di Lebanon tahun 2006.

2) Sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

e. Hasil penelitian :

Penulis menyimpulkan bahwa dalam konflik bersenjata non-internasional antara Israel dengan Hezbollah yang terjadi pada tahun 2006 banyak ditemukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Dalam konflik itu penduduk sipil dan obyek sipil tidak mendapat perlindungan dan bahkan dijadikan sasaran perang secara membabi buta oleh Israel maupun Hezbollah. Perbuatan Israel dan Hezbollah ini bertentangan dengan salah salah prinsip yang diatur dalam Hukum

Humaniter Internasional yaitu prinsip pembedaan. Selain itu juga konflik antara kedua pihak tersebut menyebabkan kerusakan besar terhadap obyek-obyek sipil seperti jalan raya, rumah penduduk, sekolah, pembangkit listrik dan instalasi air yang penting bagi masyarakat sipil.

Dengan demikian maka prinsip pembedaan dan prinsip proporsionalitas dalam Hukum Humaniter Internasional tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bertikai. Oleh karena itu kedua pihak secara jelas telah melanggar ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional.

3. SKRIPSI

a. Judul Penelitian :

Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam pertikaian bersenjata di Somalia.

b. Identitas Peneliti :

NPM : 030508552

Nama Mahasiswa : Vidyawan Permadi Kusuma

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah :

“Bagaimanakah penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam pertikaian bersenjata di Somalia?”

d. Tujuan Penelitian :

Tujuan melakukan penelitian ialah :

1) untuk mengetahui ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang dapat diterapkan dalam pertikaian bersenjata di Somalia.

2) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

e. Hasil penelitian :

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam pertikaian bersenjata di Somalia adalah dengan menggunakan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan Hukum Humaniter Kebiasaan, karena didasarkan pada jenis pertikaian bersenjata di Somalia dapat dimasukkan kedalam pertikaian bersenjata internasional dengan fakta pertikaian yang terjadi antara pasukan pemerintahan sementara Somalia dibantu pasukan Ethiopia dan Amerika Serikat, serta pasukan penjaga perdamaian melawan kelompok milisi islam yang mendapatkan dukungan dana dan senjata dari kelompok-kelompok Negara tetangga seperti Djibouti, Mesir, Eritrea, Ethiopia, Iran, Libya, Saudi Arabia, Syria, Yaman, Uganda. Bahwa ketentuan konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dapat diterapkan karena Somalia telah meratifikasi konvensi tersebut, sedangkan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan dapat diteapkan karena hukum kebiasaan dapat berlaku dengan apapun tanpa ratifikasi dari pihak-pihak.

F. Batasan Konsep :

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Perlindungan adalah usaha penyelamatan dan penjaminan hak-hak kemanusiaan dalam konflik bersenjata.
2. Hukum Humaniter Internasional menurut Pantap Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan adalah keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia yang bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.¹⁴
3. Kombatan adalah orang yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam peperangan dan apabila tertangkap oleh pihak lawan maka diperlakukan sebagai tawanan perang dari pihak yang bertikai.¹⁵
4. Non kombatan adalah bukan penduduk sipil tetapi merupakan bagian dari angkatan bersenjata yang tidak turut bertempur dan apabila tertangkap oleh musuh harus diperlakukan sebagai tawanan perang.¹⁶
5. Konflik bersenjata non-internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara dimana kelompok bersenjata yang bukan merupakan bagian dari angkatan bersenjata negara tersebut bertikai dengan pemerintah pusat negara itu.

¹⁴ Arlina permanasari, Aji Wibowo, et all, *op. cit.*, hal. 10.

¹⁵ Ambarwati. Denny Ramdhany. Rina Rusman, *op. cit.*, hal. 46.

¹⁶ Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, *op. cit.*, hal. 79.

6. Milisi adalah suatu kelompok penduduk sipil yang dipersenjatai, dilatih dan diorganisasikan untuk membentuk suatu jasa paramiliter.¹⁷
7. Faksi-faksi adalah kubu-kubu atau kelompok-kelompok bersenjata dalam suatu perang saudara atau perang sipil.¹⁸
8. Pemberontak adalah orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa pemberontakan atau konflik bersenjata dengan pemerintahan yang sah.¹⁹
9. *Free Syrian Army (FSA)* adalah adalah struktur oposisi utama kelompok bersenjata yang beroperasi di Suriah yang telah aktif selama perang saudara Suriah dan terdiri dari para personel Angkatan Bersenjata Suriah yang membelot dan relawan.²⁰

G. Metode Penelitian :

1. Jenis Penelitian :

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif berfokus pada norma hukum positif yang berupa perjanjian-perjanjian internasional yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini, juga menggunakan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan atau tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai relevansi

¹⁷ [Http://www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), dari *Wikipedia bahasa Indonesia-pengertian milisi*, ensiklopedia bebas, posted on 25 Oktober 2010.

¹⁸ [Http://www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), dari *Wikipedia bahasa Indonesia-pengertian faksi-faksi*, ensiklopedia bebas, posted on 13 April 2013.

¹⁹ [Http://www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), dari *Wikipedia bahasa Indonesia-pengertian pemberontak*, ensiklopedia bebas, posted on 4 Februari 2013.

²⁰ [Http://en.wikipedia.org/wiki/konflikuriah](http://en.wikipedia.org/wiki/konflikuriah), Landis, Joshua, *loc. cit.*

dengan permasalahan yang ditulis.

2. Sumber Data :

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dan oleh karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) 4 Konvensi Jenewa 1949
- 2) Protokol tambahan terutama Protokol I dan Protokol II tahun 1977 tentang situasi konflik bersenjata internasional dan situasi konflik non-internasional.
- 3) Resolusi-resolusi PBB dan lembaga internasional lain serta peraturan-peraturan hukum internasional yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji penulis.

b. Bahan Hukum Sekunder :

- 1) Buku-buku Hukum Humaniter Internasional
- 2) Jurnal
- 3) Website dari Internet
- 4) Majalah dan Surat Kabar

c. Bahan Hukum Tersier :

- a. Kamus Bahasa Hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia

3. Cara Pengumpulan Data

- 1) Studi Kepustakaan
- 2) Wawancara dengan Narasumber Bapak Kushartoyo Budi Santoso, Legal Adviser dari ICRC Jakarta

4. Metode Analisis Data :

Keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu dan lengkap, selanjutnya disistematisasikan atau disusun secara teratur dan bertahap agar pada akhirnya dapat dilakukan analisis data tersebut.

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu memaparkan secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang ada. Kualitatif yaitu menganalisis secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena secara sistematis.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara Deduktif. Artinya penulis dalam menguraikan kesimpulan dengan alur berpikir dari yang bersifat umum ke khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri dari 8 Sub Bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Pada Bab ini terdiri 3 Sub Bab yaitu Hukum Humaniter

Internasional, Konflik Bersenjata di Suriah, dan Perlindungan Free Syrian Army (FSA) berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Pada Sub Bab yang pertama tentang Hukum Humaniter Internasional, berisi 4 (empat) Sub Sub Bab, yaitu mengenai pengertian Hukum Humaniter Internasional, Tujuan Hukum Humaniter Internasional, Sumber Hukum Humaniter Internasional, dan Asas-asas Hukum Humaniter Internasional. Pada Sub Bab yang kedua tentang Konflik Bersenjata di Suriah, berisi 2 (dua) Sub Sub Bab, yaitu mengenai Konflik Bersenjata non-internasional, dan Konflik Bersenjata non-internasional yang terjadi di Suriah. Pada Sub Bab yang ketiga tentang Perlindungan Free Syrian Army (FSA) berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, berisi 2 (dua) Sub Sub Bab, yaitu mengenai Status Free Syrian Army (FSA) berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, dan Perlindungan Free Syrian Army (FSA) berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

BAB III PENUTUP

Pada Bab ini terdiri dari 2 (dua) Sub Bab yaitu Sub Bab kesimpulan dan Sub Bab saran.